



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2022

BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH



**LAPORAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2022 merupakan perwujudan pertanggungjawaban akuntabilitas atas kinerja pencapaian sasaran strategis yang dilaksanakan sepanjang tahun 2022. Laporan Kinerja ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2022 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Bappeda atas 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Secara umum, capaian kinerja atas sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2022 telah sangat sesuai dengan target yang ditetapkan. Ini menunjukkan kinerja Bappeda sepanjang tahun 2022 yang sudah sangat baik.

Harapan selanjutnya adalah agar Laporan Kinerja yang disusun ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang serta menjadi media untuk membangun kebersamaan dan sinergitas berdasarkan kesadaran dan komitmen bersama yang dilandasi sikap kekeluargaan, kejujuran dan ketulusan untuk berbuat yang terbaik. Semoga dimasa-masa mendatang, kinerja Bappeda akan terus membaik.

Akhirnya kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa kami memohon ridho, taufik dan hidayah-Nya. Amin.

Sungailiat, Februari 2023

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Bangka,



Ir. PAN BUDI MARWOTO, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661214 199203 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	I.1
B. Gambaran Umum Organisasi.....	I.2
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	II.1
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	II.3
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	III.1
1. Sasaran Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	III.3
1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	III.4
1.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	III.14
1.3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2019-2023	III.15
1.4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Standar Nasional	III.16
1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan/Peningkatan Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang dilakukan	III.17
1.6. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja	III.19
1.7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	III.19
2. Sasaran Meningkatnya Pelaksanaan Program Pembangunan Sesuai Perencanaan	III.20
2.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	III.20
2.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	III.24
2.3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2019-2023	III.25
2.4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Standar Nasional	III.26
2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan/Peningkatan	

Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang dilakukan	III.27
2.6. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja	III.28
2.7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	III.28
3. Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Data Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Akurat	III.29
3.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	III.29
3.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	III.31
3.3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2019-2023	III.32
3.4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Standar Nasional	III.33
3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan/Peningkatan Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang dilakukan	III.33
3.6. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja	III.34
3.7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	III.34
4. Sasaran Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	III.35
4.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	III.36
4.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	III.39
4.3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2019-2023	III.40
4.4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Standar Nasional	III.41
4.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan/Peningkatan Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang dilakukan	III.41
4.6. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja	III.42
4.7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	III.43
5. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	III.44
5.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	III.44
5.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	III.45
5.3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2019-2023	III.46

5.4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Standar Nasional	III.47
5.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan/Peningkatan Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang dilakukan	III.48
5.6. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja	III.48
5.7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	III.49
BAB IV. B. Realisasi Anggaran	III.49
PENUTUP	IV.1
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan kinerja secara periodik. Pelaporan tersebut dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan kepada setiap entitas akuntabilitas kinerja untuk menyelenggarakan SAKIP yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah dan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Tujuan dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah : 1) menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, 2) terwujudnya transparansi instansi pemerintah, 3) terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan 4) terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

B. Gambaran Umum Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bangka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten. Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A Kabupaten Bangka yang beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 66 Tahun 2016, Bappeda merupakan urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah serta menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Bappeda mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- f. Pembinaan UPT dan Jabatan Fungsional; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kewenangan Bappeda meliputi :

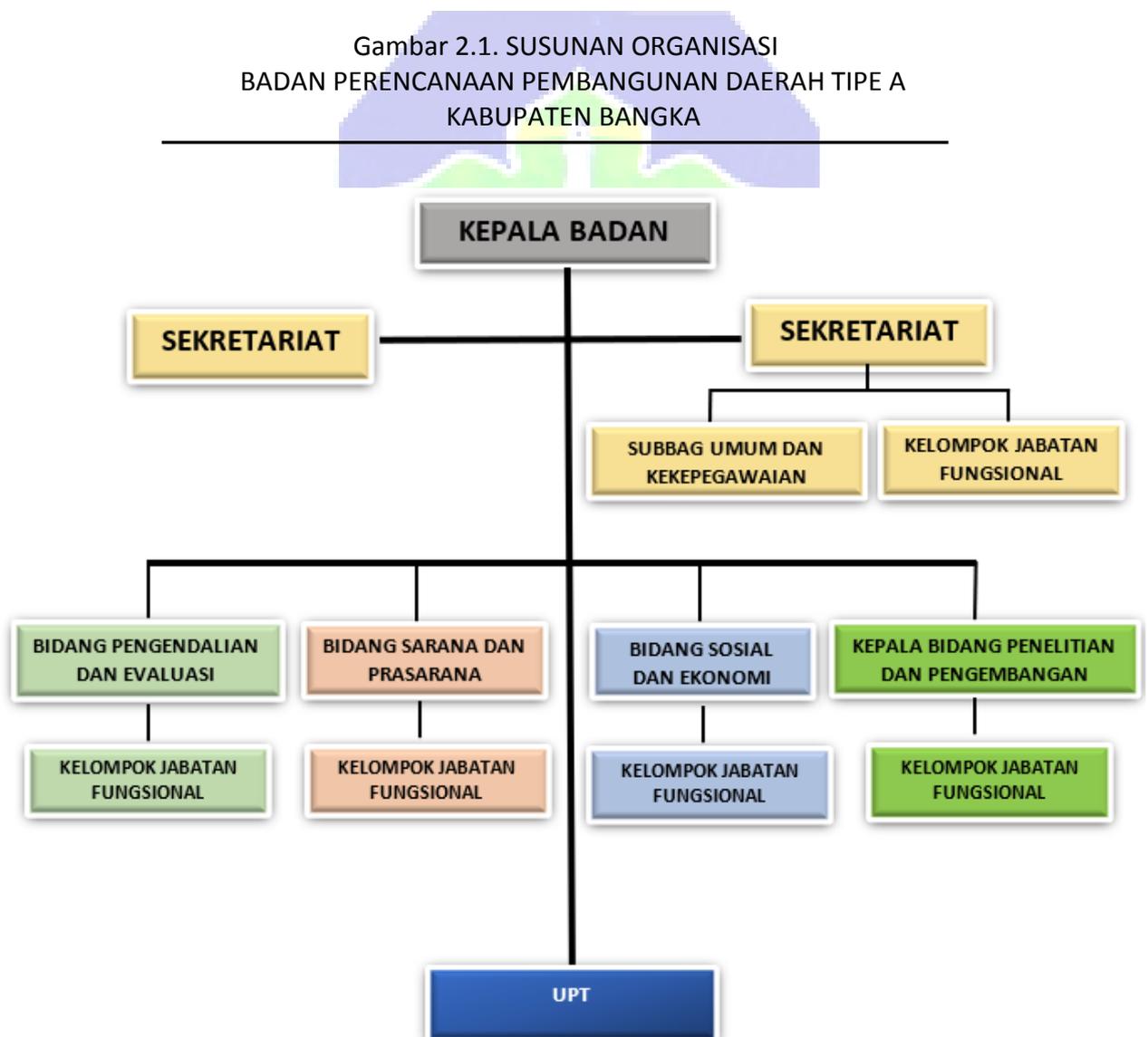
- a. Pelaksanaan unsur penunjang perencanaan bidang sosial dan ekonomi;
- b. Pelaksanaan unsur penunjang perencanaan bidang sarana dan prasarana;
- c. Pelaksanaan unsur penunjang perencanaan bidang pengendalian dan evaluasi; dan
- d. Pelaksanaan unsur penunjang bidang penelitian dan pengembangan

Susunan organisasi Bappeda terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sekretaris ;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

- d. Bidang Sosial dan Ekonomi membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Sarana dan Prasarana membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Pengendalian dan Evaluasi membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka secara detail dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini:



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023. Sebagai bentuk komitmen dalam pencapaian visi Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 dan implikasi terhadap perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 yang merupakan respon terhadap kejadian luar biasa atas munculnya wabah pandemi Covid 19 yang mengharuskan terjadinya penyesuaian terhadap beberapa target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 dan sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka memandang perlu melaksanakan Perubahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Bangka 2019-2023.

Dalam Perubahan Renstra Bappeda 2019-2023, berdasarkan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD dengan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda serta dengan mempertimbangkan hasil analisa terhadap isu-isu strategis yang ada, maka tujuan pembangunan jangka menengah Bappeda yang ingin diwujudkan dalam periode tahun 2019-2023 adalah :

“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif”

Untuk mengukur ketercapaian dari tujuan Bappeda pada akhir periode Renstra Bappeda tersebut, dapat diukur melalui indikator tujuan yaitu, Nilai Aspek Perencanaan Dalam Evaluasi AKIP Kabupaten.

Untuk menterjemahkan keberhasilan pembangunan jangka menengah diatas secara tahunan, maka dirumuskan beberapa sasaran strategis, yaitu :

1. Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan
2. Meningkatnya pelaksanaan Program Pembangunan Sesuai perencanaan
3. Meningkatnya Ketersediaan Data Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah yang akurat
4. Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan dlm perencanaan

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja jangka menengah dalam Perubahan Renstra Bappeda digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, sasaran dan indikator kinerja jangka menengah pelayanan OPD
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2019-2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET INDIKATOR SASARAN TAHUN			KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA
				2021	2022	2023	
1.	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas dan aplikatif		Nilai Aspek Kinerja Perencanaan Dalam Evaluasi AKIP Kabupaten	24,30	25,30	26,30	26,30
1.		Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan	Persentase Keselarasan Antar Perencanaan	90,00%	91,00%	92,00%	92,00%
2.		Meningkatnya pelaksanaan Program Pembangunan Sesuai Perencanaan	Persentase Capaian Kinerja Daerah yang sesuai Target RPJMD	84,00%	86,00%	88,00%	88,00%
3.		Meningkatnya Kualitas Data Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah yang berbasis teknologi informasi	Persentase Data Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah yang dimanfaatkan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2022 merupakan janji pencapaian target kinerja tahun keempat sasaran dan target yang ditetapkan dalam Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Bangka 2019-2023. Perjanjian kinerja ini juga mencantumkan rencana anggaran untuk setiap programnya. Besaran anggaran dalam formulir Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022 ini merupakan besaran anggaran yang tercantum dalam APBD induk Tahun Anggaran 2022. Rincian Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2022 adalah sebagai disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bangka Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan	Persentase Keselarasan Antar Perencanaan	100,00
2.	Meningkatnya pelaksanaan program pembangunan sesuai perencanaan	Persentase Pelaksanaan Program Tahunan yang Sesuai RPJMD	88,00
3.	Meningkatnya ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan daerah yang akurat	Persentase Ketersediaan Data Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Akurat	75,00
5.	Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	100,00

6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda	Nilai Evaluasi AKIP Bappeda	A (85,00)
No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	432.603.350,00	APBD
2.	Penelitian dan Pengembangan Daerah	356.352.000,00	APBD
3.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.343.052.850,00	APBD
	Jumlah	8.132.008.200,00	

Selanjutnya dalam rangka mengakomodir adanya perubahan alokasi anggaran program dan kegiatan pada tahun anggaran 2022 dilaksanakan reviu terhadap perjanjian kinerja 2022. Hal ini sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana huruf E dijelaskan : Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut, yaitu :

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Revisi dan perubahan Formulir Lampiran Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertera pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Revisi dan Perubahan Lampiran Perjanjian Kinerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka
Tahun Anggaran 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan	100,00
2.	Meningkatnya pelaksanaan program pembangunan sesuai perencanaan	Persentase Pelaksanaan Program Tahunan yang Sesuai RPJMD	88,00
3.	Meningkatnya ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan daerah yang akurat	Persentase Ketersediaan Data Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Akurat	100,00
4.	Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	100,00
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda	Nilai Evaluasi AKIP Bappeda	A
No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.134.941.745,00	APBD
2.	Penelitian dan Pengembangan Daerah	455.135.600,00	APBD
3.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.927.774.110,00	APBD
	Jumlah	9.517.851.455,00	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2022 dilaksanakan pengumpulan data kinerja dengan melibatkan seluruh bidang lingkup Bappeda Kabupaten Bangka. Pengumpulan data kinerja dilakukan dengan tujuan memperoleh data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten yang berguna dalam pengambilan keputusan sebagai upaya perbaikan kinerja Bappeda selanjutnya.

Langkah selanjutnya, dilaksanakan pengukuran capaian kinerja dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode ini dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja/target kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tahapan berikut yang dilaksanakan adalah analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*Performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang dilakukan dimasa mendatang, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk melihat derajat kinerja sasaran, maka dilakukan penentuan skala derajat kinerja dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.1 Klasifikasi Derajat Kinerja Sasaran

No.	SKALA	KINERJA SASARAN	KODE
1	$91 \geq$	Sangat Tinggi	ST
2	$76 \leq 90$	Tinggi	T
3	$66 \leq 75$	Sedang	S
4	$51 \leq 65$	Rendah	R
5	≤ 50	Sangat Rendah	SR

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 10A Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja masing-masing indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 dan diperjanjikan secara tahunan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama
Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2022**

No	Indikator	Capaian 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2021 terhadap Target Renstra (%)
			Target	Realisasi	%		
1.	Persentase Keselarasan Antar Perencanaan	100,00	100,00	100,00	100,00	92,00	108,69
2.	Persentase Pelaksanaan Program Tahunan yang Sesuai RPJMD	92,50	88,00	89,17	101,33	88,00	101,33
3.	Persentase Ketersediaan Data Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Akurat	83,33	100,00	100,00	100,00	100,00	80,00
4.	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	80,00

Secara umum capaian kinerja Bappeda Kabupaten Bangka pada tahun 2022 dapat dinyatakan berhasil karena telah sesuai target yang ditetapkan. Sebanyak 1 (satu) indikator sasaran memiliki capaian diatas 100,00 persen, dan 3 (tiga) indikator dengan capaian sebesar 100,00 persen.

Pencapaian kinerja sasaran tahun 2022 selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran : Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan.

Sasaran pertama yang ingin dicapai Bappeda Kabupaten Bangka adalah meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan yang diukur dengan indikator kinerja **persentase keselarasan antar perencanaan**. Persentase keselarasan antar perencanaan merupakan akumulasi keselarasan antar tingkat perencanaan dimulai dari keselarasan antara perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dengan perencanaan jangka menengah nasional (RPJMN), keselarasan perencanaan tahunan daerah (RKPD) dengan perencanaan tahunan nasional (RKP), keselarasan perencanaan tahunan daerah (RKPD) dengan perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD), keselarasan perencanaan jangka

menengah perangkat daerah (Renstra) dengan perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dan terakhir keselarasan perencanaan tahunan perangkat daerah (Renja-PD) dengan perencanaan tahunan daerah (RKPD).

1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Persentase keselarasan antar perencanaan pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100,00 persen dan dapat direalisasikan sebesar 100,00 persen dengan capaian kinerja sebesar 100,00 persen atau sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja atas indikator kinerja persentase keselarasan antar perencanaan pada tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Atas Sasaran Meningkatnya Keselarasan
Perencanaan Pembangunan Tahun 2022

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	Persentase Keselarasan Antar Perencanaan	%	100,00	100,00	100,00	ST
	Rata-rata Capaian				100,00	ST

Capaian kinerja atas sasaran meningkatnya keselarasan antar perencanaan sebesar 100,00 persen diperoleh dari capaian keselarasan beberapa komponen, yaitu :

- 1) persentase keselarasan antara perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) terhadap perencanaan jangka menengah nasional (RPJMN) sebesar 100,00 persen,
- 2) persentase keselarasan perencanaan tahunan daerah (RKPD) terhadap perencanaan tahunan nasional (RKP) sebesar 100, 00 persen,
- 3) persentase keselarasan antara perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dengan perencanaan jangka menengah perangkat daerah (Renstra PD) sebesar 100,00 persen, dan

- 4) persentase keselarasan antara perencanaan tahunan daerah (RKPD) terhadap perencanaan tahunan perangkat daerah (Renja PD) sebesar 100,00 persen.

Analisis capaian kinerja keselarasan masing-masing komponen adalah sebagai berikut :

1) Keselarasan antara Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terhadap Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Keselarasan antara perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) terhadap perencanaan jangka menengah nasional (RPJMN) diukur melalui keselarasan beberapa aspek perencanaan, yaitu keselarasan isu strategis, keselarasan sasaran pembangunan, keselarasan strategi dan arah kebijakan dan keselarasan program prioritas. Secara komparatif, aspek-aspek perencanaan dimaksud dalam RPJMD Kabupaten Bangka telah selaras dengan RPJMN.

Telaahan keselarasan antara RPJMD Kabupaten Bangka dengan RPJMN sebagaimana tercantum dalam bukti dukung pada Lampiran laporan ini adalah sebagai berikut :

1. *Dari 10 isu strategis yang terdapat dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 semuanya telah selaras dengan dengan isu strategis yang terdapat dalam RPJMN 2020-2024. Ini menunjukkan tingkat keselarasan antara isu strategis dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 terhadap isu strategis nasional dalam RPJMN mencapai 100,00 persen.*
2. *Selanjutnya dari 13 (tiga belas) sasaran yang terdapat dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 telah pula selaras dengan sasaran RPJMN 2020-2024 yang berarti bahwa tingkat keselarasan antara sasaran pembangunan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 terhadap sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 mencapai 100,00 persen.*

3. Strategi dan arah kebijakan daerah dalam agenda **meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri sektor pertanian dan pariwisata** telah selaras dengan arah kebijakan nasional
4. Strategi dan arah kebijakan daerah dalam agenda **pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas** telah selaras dengan arah kebijakan nasional.
5. Strategi dan arah kebijakan daerah dalam agenda **pembangunan sektor unggulan** telah selaras dengan arah kebijakan nasional.
6. Strategi dan arah kebijakan daerah dalam agenda **pembangunan infrastruktur pada kawasan permukiman dan peningkatan konektivitas antar kawasan potensial** telah selaras dengan arah kebijakan nasional.
7. Strategi dan arah kebijakan daerah dalam agenda **peningkatan pengelolaan SDA dan kualitas lingkungan hidup** telah selaras dengan arah kebijakan nasional.
8. Strategi dan arah kebijakan daerah dalam agenda **peningkatan penyelenggaraan tata kelola dan reformasi birokrasi** telah selaras dengan arah kebijakan nasional.

Secara umum tingkat keselarasan antara program prioritas dalam RPJMD terhadap program prioritas dalam RPJMN mencapai 81,25 persen. Tingkat keselarasan yang demikian lebih disebabkan adanya 4 (empat) program prioritas nasional yang memang secara urusan bukan menjadi ranah pemerintah daerah atau menjadi urusan pemerintah daerah. Dengan memperhatikan kewenangan pelaksanaan urusan, tingkat keselarasan antara program prioritas dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 terhadap RPJMN 2020-2024 mencapai 100,00 persen.

2) Keselarasan antara Perencanaan Tahunan Daerah (RKPD) terhadap Perencanaan Tahunan Nasional (RKP)

RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2023 mengusung tema **“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial Menuju**

Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan“. RKP Kabupaten Bangka Tahun 2023 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2022 pada Tanggal 04 Juli 2022. Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas, ditetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2022 yaitu (1) Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial yang berkeadilan; (2) Industri, Pertanian, UMKM dan Pariwisata ; (3) Reformasi Birokrasi; (4) Konektivitas Infrastruktur); dan (5) Bencana.

Telaahan keselarasan antara RKP Kabupaten Bangka Tahun 2023 dengan RKP Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 7 Prioritas Nasional, 37 Program Prioritas Nasional, 181 Kegiatan Prioritas Nasional dan 445 Proyek Prioritas Nasional dalam RKP 2023.
2. Dari 181 Kegiatan Prioritas Nasional, 98 Kegiatan Prioritas Nasional (54,15 persen) tidak sesuai dengan Program Prioritas Daerah.
3. Dari 98 Kegiatan Prioritas Nasional yang tidak sesuai dengan Program Prioritas Daerah, sebanyak 89 kegiatan (49,17 persen) merupakan kewenangan pusat dan 9 kegiatan (4,97 persen) merupakan kewenangan propinsi.
4. Terdapat 83 Kegiatan Prioritas Nasional (45,86 persen) yang merupakan kewenangan daerah dan seluruhnya selaras dengan Program Prioritas Daerah.
5. Dari 445 Proyek Prioritas Nasional sebanyak 260 proyek prioritas nasional merupakan kewenangan daerah dan selaras dengan kegiatan (proyek) daerah sementara 175 proyek merupakan kewenangan pusat dan 10 proyek merupakan kewenangan propinsi.
6. Berdasarkan kewenangannya maka 100 persen Prioritas Daerah telah sesuai dengan Prioritas Nasional, 100 persen Program Prioritas Daerah

telah sesuai dengan Kegiatan Prioritas Nasional dan 100 persen kegiatan daerah telah selaras dengan Proyek Prioritas Nasional.

3) Keselarasan antara Perencanaan Tahunan Daerah (RKPD) terhadap Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kesesuaian Perencanaan Tahunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka terhadap perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) diukur dengan membandingkan kesesuaian beberapa aspek perencanaan, yaitu kesesuaian sasaran, kesesuaian indikator sasaran, kesesuaian program, kesesuaian indikator program dan kesesuaian target program.

Berdasarkan analisis komparatif terhadap aspek-aspek perencanaan dimaksud sesuai dengan bukti dukung yang disajikan dalam Lampiran, diperoleh telaahan kesesuaian antara RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2023 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Bangka 2019-2023 sebagai berikut :

- 1. Terdapat 13 (tiga belas) Sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Bangka pada RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2023. Kesemua sasaran tersebut telah selaras atau sesuai dengan sasaran yang terdapat dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023.*
- 2. Selanjutnya, dari ke-13 (tiga belas) sasaran yang terdapat dalam RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2023 diukur dengan dua puluh satu (21) indikator. Bila dibandingkan dengan indikator sasaran yang terdapat dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, seluruh indikator sasaran tersebut telah selaras dengan indikator sasaran RPJMD.*
- 3. Terdapat 120 (seratus dua puluh) Program dalam RKPD Tahun 2023 yang berdasarkan nomenklaturnya secara keseluruhan sesuai atau selaras dengan Program pada Perubahan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023.*
- 4. Terdapat 224 (dua ratus dua puluh empat) indikator program yang dijadikan sebagai alat ukur atas pelaksanaan 120 (seratus dua puluh)*

Program pada RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2023. Keseluruhan indikator program yang ada dalam RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2023 telah selaras dengan indikator program yang terdapat dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023.

5. *Dalam RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2023 dari 120 (seratus dua puluh) Program yang direncanakan dilaksanakan, ditetapkan 224 (dua ratus dua puluh empat) target yang akan dicapai. Keseluruhan target program yang ada dalam RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2023 telah selaras dengan target program yang terdapat dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023.*

6. *Berdasarkan keselarasan antara sasaran, indikator sasaran, program, indikator program dan target indikator program, maka tingkat keselarasan antara RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2023 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 mencapai 100,00 persen.*

4) Keselarasan antara Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terhadap Perencanaan Jangka Menengah Perangkat Daerah (Renstra PD)

Keselarasan antara perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dengan perencanaan jangka menengah perangkat daerah (Renstra PD) diukur dari aspek-aspek perencanaan yang meliputi sinergitas program, indikator program serta target program. Rekapitulasi kesesuaian program, indikator program dan target program dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Kesesuaian Perubahan RPJMD Kab. Bangka Tahun 2019 – 2023
dengan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2023

No	NAMA PERANGKAT DAERAH	PERUBAHAN RPJMD KAB. BANGKA Tahun 2019-2023			PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2023			PERSENTASE KESESUAIAN		
		Jumlah Program	Jumlah Indikator Program	Jumlah Target Program	Jumlah Program	Jumlah Indikator Program	Jumlah Target Program	Jumlah Program	Jumlah Indikator Program	Jumlah Target Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	DINDIKPORA	5	15	15	5	15	15	100	100	100
2	DINKES	4	6	6	4	6	6	100	100	100
3	DINPUHR	10	11	11	10	11	11	100	100	100
4	DINPERKPP	8	9	9	8	9	9	100	100	100
5	SATPOL PP	2	7	7	2	7	7	100	100	100
6	BPBD	1	1	1	1	1	1	100	100	100
7	DINAS SOSIAL	3	3	3	3	3	3	100	100	100
8	DINAKEK PERINDAG	10	12	12	10	12	12	100	100	100
9	DP2KBP3A	9	13	13	9	13	13	100	100	100
10	DINPANPERTAN	9	15	15	9	15	15	100	100	100
11	DINLH	7	8	8	7	8	8	100	100	100
12	DINDUKPENCAPII	2	13	13	2	13	13	100	100	100
13	DINPEMDES	3	3	3	3	3	3	100	100	100
14	DINPERHUB	1	5	5	1	5	5	100	100	100
15	DINKOMINFOTIK	4	5	5	4	5	5	100	100	100
16	DPMP2KUKM	10	11	11	10	11	11	100	100	100
17	DINPARBUDAYA	5	6	6	5	6	6	100	100	100
18	DKP	2	13	13	2	13	13	100	100	100
19	DINPERKAN	2	4	4	2	4	4	100	100	100
20	SEKDA	2	12	12	2	12	12	100	100	100
21	SEKWAN	1	3	3	1	3	3	100	100	100
22	BAPPEDA	2	12	12	2	12	12	100	100	100
23	BPPKAD	3	10	10	3	10	10	100	100	100
24	BKPSDMD	2	6	6	2	6	6	100	100	100
25	INSPEKTORAT	2	4	4	2	4	4	100	100	100
26	KECAMATAN	4	5	5	4	5	5	100	100	100
27	BADAN KESBANGPOL	5	5	5	5	5	5	100	100	100
28	PROGRAM RUTIN SETIAP PERANGKAT DAERAH	1	6	6	1	6	6	100	100	100
	JUMLAH	120	224	224	120	224	224	100	100	100

Berdasarkan Tabel 3.4. diatas, dari 120 Program yang terdapat dalam dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, keseluruhannya telah sesuai dengan Program yang terdapat dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023. Demikian pula dengan 224 indikator program dan targetnya yang terdapat dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah telah sesuai dengan indikator dan target program yang terdapat dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023. **Ini menunjukkan tingkat kesesuaian program, indikator program dan target program antara dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2023 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 mencapai 100,00 persen atau telah sesuai dengan ketentuan.**

5) Keselarasan antara Perencanaan Tahunan Daerah (RKPD) terhadap Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah (Renja PD)

Keselarasan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2023 diukur melalui tingkat sinergitas antara kesesuaian program, indikator program, target program, kegiatan, indikator kegiatan target kegiatan, sub kegiatan, indikator sub kegiatan dan target sub kegiatan. Rekapitulasi kesesuaian program, indikator program, target program, kegiatan, indikator kegiatan, target kegiatan, sub kegiatan, indikator sub kegiatan dan target sub kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.5. berikut.

Tabel 3.5.
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Kesesuaian Dokumen Renja PD Tahun 2023
dengan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2023

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	RKPD KAB. BANGKA TAHUN 2022									RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022									PERSENTASE KESELARASAN								
		P	IP	TP	K	IK	TK	SK	ISK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	ISK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	ISK	TSK
1	DINDIKPORA	5	15	15	13	37	37	100	121	121	5	15	15	13	37	37	100	121	121	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	DINKES	4	6	6	11	42	42	43	103	103	4	6	6	11	42	42	43	103	103	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	DINPUHR	10	11	11	15	16	16	41	821	821	10	11	11	15	15	15	41	817	817	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	DINPERKPP	8	9	9	12	13	13	22	23	23	8	9	9	12	13	13	22	23	23	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	SATPOL PP	2	7	7	6	15	15	13	31	31	2	7	7	6	15	15	13	31	31	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	BPBD	1	1	1	3	3	3	7	14	14	1	1	1	3	3	3	7	14	14	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	DINSOS	3	3	3	6	6	6	23	38	38	3	3	3	6	6	6	23	38	38	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	DINAKERPERINDAG	10	10	10	12	19	19	19	35	35	10	10	10	12	19	19	19	35	35	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	DP2KBPA	9	12	12	20	22	22	52	67	67	9	12	12	20	22	22	52	67	67	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	DINPANPERTAN	8	15	15	14	26	26	25	96	96	8	15	15	14	26	26	25	96	96	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	DINLH	7	8	8	9	13	13	26	27	27	7	8	8	9	13	13	26	27	27	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	DINDUKPENCAPI	2	13	13	5	5	5	7	8	8	2	13	13	5	5	5	7	8	8	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	DINPEMDES	3	3	3	3	13	13	17	18	18	3	3	3	3	13	13	17	18	18	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	DINPERHUB	1	7	7	13	16	16	39	67	67	1	7	7	13	16	16	39	67	67	100	100	100	100	100	100	100	100	100
15	DINKOMINFOTIK	4	4	4	4	4	4	8	10	10	4	4	4	4	4	4	8	10	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16	DPMP2KUKM	10	11	11	10	14	14	17	23	23	10	11	11	10	14	14	17	23	23	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	DINPARBUDAYA	5	7	7	8	15	15	16	40	40	5	7	7	8	15	15	16	40	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18	DKP	2	13	13	5	22	22	13	48	48	2	13	13	5	22	22	13	48	48	100	100	100	100	100	100	100	100	100
19	DINPERKAN	2	4	4	9	24	24	23	49	49	2	4	4	9	24	24	23	49	49	100	100	100	100	100	100	100	100	100

20	SEKDA	3	13	13	12	28	28	27	70	70	3	13	13	12	28	28	27	70	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
21	SEKWAN	2	3	3	6	10	10	11	15	15	2	3	3	6	10	10	11	15	15	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
22	BAPPEDA	2	12	12	4	24	24	9	30	30	2	12	12	4	24	24	9	30	30	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
23	BPPKAD	3	10	10	7	14	14	46	117	117	3	10	10	7	14	14	46	117	117	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
24	BKPSDMD	2	6	6	5	12	12	12	28	28	2	6	6	5	12	12	12	28	28	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
25	INSPEKTORAT	2	4	4	3	7	7	13	16	16	2	4	4	3	7	7	13	16	16	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
26	KEC. SUNGAILIAT	4	5	5	6	10	10	9	46	46	4	5	5	6	10	10	9	46	46	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
27	KEC. PEMALI	4	5	5	4	8	8	5	9	9	4	5	5	4	8	8	5	9	9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
28	KEC. MERAWANG	4	5	5	4	8	8	5	9	9	4	5	5	4	8	8	5	9	9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
29	KEC. PUDING BESAR	4	5	5	4	8	8	5	9	9	4	5	5	4	8	8	5	9	9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
30	KEC. BAKAM	4	5	5	4	8	8	5	9	9	4	5	5	4	8	8	5	9	9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
31	KEC. MENDO BERAT	4	5	5	4	8	8	5	9	9	4	5	5	4	8	8	5	9	9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
32	KEC. RIAU SILIP	4	5	5	4	8	8	5	9	9	4	5	5	4	8	8	5	9	9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
33	KEC. BELINYU	4	5	5	6	10	10	9	31	31	4	5	5	6	10	10	9	31	31	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
34	BADAN KESBANGPOL	5	5	5	5	5	5	8	13	13	5	5	5	5	5	5	8	13	13	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Keterangan :

P	:	Program
IP	:	Indikator Program
TP	:	Target Program
K	:	Kegiatan
IK	:	Indikator Kegiatan
TK	:	Target Kegiatan
SK	:	Sub Kegiatan
ISK	:	Indikator Sub Kegiatan
TSK	:	Target Sub Kegiatan

Evaluasi kesesuaian program, indikator program, target program, kegiatan, indikator kegiatan, target kegiatan, sub kegiatan, indikator sub kegiatan dan target sub kegiatan antara dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2023 sebagaimana tersaji pada Tabel 3.5 memiliki tingkat kesesuaian sebesar **100,00 persen**. Tahapan verifikasi Renja Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Bangka dalam rangka menjamin Renja Perangkat Daerah untuk dapat selaras dengan RKPD dilakukan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada.

1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan realisasi kinerja dan Capaian Kinerja atas indikator kinerja persentase keselarasan perencanaan tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir atas sasaran Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Keselarasan Antar Perencanaan	%	98,44	115,81	100,00	111,11	100,00	100,00	100,00	100,00

Persentase keselarasan antar perencanaan pembangunan cenderung berkembang sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Pada tahun 2019, realisasi persentase keselarasan antar perencanaan adalah sebesar 98,44 persen yang menunjukkan masih adanya inkonsistensi dalam penyusunan perencanaan. Selanjutnya mulai tahun 2020, realisasi kinerja persentase keselarasan perencanaan telah mencapai kondisi maksimal yaitu sebesar 100 persen, yang menunjukkan proses perencanaan yang semakin baik dari tahun sebelumnya. Dan terus konsisten dari tahun 2020 ke tahun 2021 hingga tahun 2022. Ditinjau

dari segi capaian kinerja, yang membandingkan antara target dan realisasi, capaian kinerja tahun 2019 relatif lebih tinggi dibandingkan capaian kinerja tahun-tahun berikutnya. Ini disebabkan mulai tahun 2021 hingga 2022, target kinerja yang ditetapkan telah berada pada batas tertinggi yang bisa dicapai. Selanjutnya realisasi kinerja telah sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja pun telah berada pada kondisi paling optimal yang bisa dicapai.

1.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra Bappeda Tahun 2019-2023

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 atas indikator kinerja persentase keselarasan perencanaan dengan target jangka menengah Renstra Bappeda Tahun 2019-2022 disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022
dengan Target Jangka Menengah Renstra Bappeda Tahun 2019-2023
atas sasaran Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Target Akhir Renstra	Capaian s.d Tahun 2022 Terhadap Target Renstra (%)
1.	Persentase Keselarasan Antar Perencanaan	100,00	100,00	100,00	92,00	108,69

Realisasi kinerja atas indikator persentase keselarasan perencanaan sampai dengan tahun 2022 telah melampaui target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda Tahun 2019-2022. Target jangka menengah ditetapkan sebesar 92,00 persen, sementara realisasi kinerja hingga tahun 2022 telah mencapai 100,00 persen. Kondisi ini akan dapat berubah pada tahun-tahun berikutnya apabila Bappeda tidak mampu melaksanakan pengendalian dalam proses penyusunan perencanaan pada setiap tahapannya. Selain itu, capaian ini juga akan menjadi pertimbangan untuk menetapkan target kinerja atas indikator

persentase keselarasan perencanaan pada tahun-tahun selanjutnya yang akan dapat lebih tinggi dari target jangka menengah Renstra Bappeda.

1.4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional

Tidak terdapat standar nasional atas indikator kinerja persentase keselarasan antar perencanaan sehingga tidak dapat dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2022 dengan standar nasional. Walaupun demikian, perencanaan kinerja merupakan salah satu aspek yang menjadi komponen penilaian dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Keselarasan perencanaan akan sangat berpengaruh terhadap kualitas perencanaan. Selanjutnya kualitas perencanaan akan berkontribusi cukup signifikan dalam penilaian AKIP Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil penilaian Kementerian PAN dan RB, perencanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka terus berkembang ke arah positif. Pelan tapi pasti, nilai aspek perencanaan terus meningkat setiap tahunnya. Sampai dengan tahun 2021, aspek perencanaan kinerja telah mencapai nilai 23,75 poin dari total bobot 30 poin. Nilai ini lebih meningkat dari nilai-nilai tahun sebelumnya sebagaimana tertera pada Tabel berikut.

Tabel 3.8
Perkembangan Komponen Penilaian AKIP
Kabupaten Bangka Tahun 2016-2022

NO	KOMPONEN PENILAIAN AKIP	BOBOT	NILAI					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Perencanaan Kinerja	30	19,95	20,27	22,30	22,95	23,57	23,75
2.	Pengukuran Kinerja	25	12,92	18,43	16,41	17,64	18,00	18,15
3.	Pelaporan Kinerja	15	8,64	9,81	10,19	10,17	10,30	10,40
4.	Evaluasi Internal	10	4,69	5,84	6,40	6,27	6,37	6,53
5.	Capaian Kinerja	20	12,32	12,42	12,02	13,15	13,26	13,44
Nilai Evaluasi		100	58,22	66,77	67,33	70,18	71,50	72,27
Tingkat Akuntabilitas			CC	B	B	BB	BB	BB

Sumber : LHE AKIP Kabupaten Bangka, 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021

1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan/Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang dilakukan

Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Bappeda dalam upaya pencapaian kinerja atas sasaran meningkatnya keselarasan perencanaan antara lain :

1. Pelaksanaan Peraturan Bupati Bangka Nomor 4A Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangka.
2. Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 dengan mempedomani RPJMN.
3. Pelaksanaan pengendalian penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mencakup verifikasi Renstra OPD, verifikasi Renja OPD, verifikasi kesesuaian RKPD dan verifikasi kesesuaian RPJMD Kabupaten Bangka periode 2019-2023.
4. Peningkatan koordinasi dengan APIP dalam tindak lanjut hasil reuiu dokumen perencanaan pada setiap tahapan.

Walaupun realisasi pencapaian kinerja atas sasaran ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan, masih tetap terdapat beberapa hambatan dalam pencapaian sasaran dimaksud, antara lain :

1. Peningkatan kapasitas dan komitmen kepala Perangkat Daerah terhadap perencanaan kinerja masih belum diikuti oleh pemahaman dan komitmen yang sama oleh seluruh aparatur di berbagai level jabatan.
2. Verifikasi indikator kinerja antar dokumen perencanaan memerlukan tingkat ketelitian, ketekunan dan sumber daya yang relatif besar.
3. Terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Untuk mengatasi masalah tersebut diatas, beberapa langkah yang masih harus dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Bangka untuk keberlanjutan kinerja meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan adalah :

1. Kelanjutan pelaksanaan Satuan Tugas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Satgas SAKIP) dalam pengendalian atas penyusunan dokumen-dokumen perencanaan.
2. Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam penyusunan perencanaan demi menjamin konsistensi perencanaan disetiap tahapan mulai dari perencanaan tahun 2020.
3. Internalisasi penyusunan perencanaan kinerja kepada semua level aparatur perangkat daerah.
4. Pemetaan kembali Nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan dan indicator kinerja sub kegiatan pada dokumen perencanaan yang telah disusun dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan dan indicator kinerja yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

1.6. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya keselarasan perencanaan didukung oleh pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah melalui pelaksanaan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan serta pelaksanaan 4 (empat) Sub Kegiatan, yaitu : 1) Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya, 2) Konsultasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD, 3) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota dan 4) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

1.7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efektifitas pelaksanaan program tersebut diatas dalam pencapaian kinerja sasaran meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan diukur dengan membandingkan capaian realisasi keuangan atas Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dimaksud terhadap capaian kinerja sasaran tersebut. Pada tahun 2022, realisasi keuangan atas Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah adalah sebesar 71,77 persen dan mampu merealisasikan capaian kinerja sasaran sebesar 100,00 persen sehingga tingkat efektivitas program tersebut dalam mencapai sasaran adalah sebesar 139,33 persen atau sangat efektif (Tabel 3.9).

Tabel 3.9
Tingkat Efektivitas Program
Terhadap Capaian Sasaran Meningkatnya Keselarasan Perencanaan
Tahun 2022

Tahun	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran (%)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
2022	71,77	100,00	139,33	Sangat Efektif

Sementara itu, ditinjau dari segi efisiensi penggunaan sumber daya dalam menunjang pencapaian sasaran, terlihat bahwa tingkat efisiensi anggaran terhadap pencapaian sasaran meningkatnya keselarasan perencanaan mencapai 28,23 persen. Efisiensi ini diperoleh dengan mengurangi realisasi capaian kinerja (100,00 persen) terhadap realisasi anggaran program (71,77 persen) sebagaimana tertera pada Tabel 3.10 berikut :

Tabel 3.10
Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran
Meningkatnya Keselarasan Perencanaan
Tahun 2022

Tahun	Pagu Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (Rp)	Persentase (%)	Efisiensi (%)
2022	415.724.750,00	298.369.508,00	71,77	28,23

Sumber : Laporan Keuangan Bappeda Tahun 2022

2. Sasaran : Meningkatkan pelaksanaan program pembangunan sesuai perencanaan.

Sasaran kedua yang ingin dicapai oleh Bappeda Kabupaten Bangka dalam Rencana Strategisnya adalah meningkatnya pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan perencanaan. Hal ini untuk menguji tingkat aplikasi dari dokumen tersebut, yang menunjukkan bahwa dokumen-dokumen perencanaan yang disusun tidak hanya sekedar dokumen tetapi harus diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan.

2.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Kinerja Bappeda dalam mencapai sasaran meningkatnya pelaksanaan program pembangunan sesuai perencanaan akan diukur dengan indikator persentase pelaksanaan program tahunan yang sesuai dengan RPJMD. Perbandingan target dan realisasi kinerja untuk sasaran tersebut pada tahun 2022 disajikan pada Tabel 3.11 berikut :

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelaksanaan Program Pembangunan
Sesuai Perencanaan Tahun 2022

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	Persentase Pelaksanaan Program Tahunan Yang Sesuai Dengan RPJMD	%	88,00	89,17	101,33	ST
	Rata-rata Capaian				101,33	ST

Pada tahun 2022, Bappeda Kabupaten Bangka menetapkan target persentase pelaksanaan program tahunan yang sesuai RPJMD sebesar 88,00 persen. Berdasarkan hasil perhitungan atas jumlah program tahunan 2022 yang dilaksanakan sesuai RPJMD, diketahui realisasi persentase pelaksanaan program tahunan yang sesuai dengan RPJMD mencapai 89,17 persen atau capaian kinerja atas indikator ini mencapai 101,33 persen dan masuk dalam kriteria Sangat Tinggi.

Persentase pelaksanaan program tahunan yang sesuai dengan RPJMD ini diukur dengan membandingkan antara jumlah program yang dilaksanakan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2022 terhadap jumlah program RPJMD yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka pada tahun 2022. Dari 120 (seratus dua puluh) Program yang terdapat dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 keseluruhannya direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2022. Dari jumlah Program tersebut, sebanyak 107 (seratus tujuh) Program atau sebesar 89,17 persen dilaksanakan dalam APBD Kabupaten Bangka tahun 2022.

Rekapitulasi jumlah program RPJMD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka pada tahun 2022 per urusan disajikan pada Tabel 3.12 berikut :

Tabel 3.12
Rekapitulasi Perbandingan Program Perubahan RPJMD 2019-2023, Perubahan RKPd Tahun 2022 dan Perubahan APBD Tahun 2022 Kabupaten Bangka

No	Urusan	Jumlah Program		
		P-RPJMD 2019-2023	P-RKPD 2022	P-APBD 2022
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			
1.1	Pendidikan	3	2	2
1.2	Kesehatan	4	4	4
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	9	9
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4	3	3
1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3	3	3
1.6	Sosial	3	3	3
2	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR			
2.1	Tenaga Kerja	3	2	2
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	5	5
2.3	Pangan	4	2	1
2.4	Pertanahan	4	4	4
2.5	Lingkungan Hidup	7	7	7
2.6	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	1	1
2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	3	3
2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	3	3
2.9	Perhubungan	1	1	1
2.10	Komunikasi dan Informatika	2	2	2
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5	5	5
2.12	Penanaman Modal	5	5	4
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	2	2	2
2.14	Statistika	1	1	1
2.15	Persandian	1	1	1
2.16	Kebudayaan	2	2	2
2.17	Perpustakaan	1	1	1
2.18	Kearsipan	1	1	1
3	URUSAN PILIHAN			
3.1	Kelautan dan Perikanan	2	2	2
3.2	Pariwisata	3	3	3
3.3	Pertanian	6	5	5
3.4	Perdagangan	4	4	3
3.5	Perindustrian	3	3	2
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			

4.1	Sekretariat Daerah	2	2	2
4.2	Sekretariat Dewan	1	1	1
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5.1	Bidang Perencanaan	1	1	1
5.2	Bidang Keuangan	3	3	3
5.3	Bidang Kepegawaian	1	1	1
5.4	Bidang Pendidikan dan Pelatihan	1	1	1
5.5	Bidang Penelitian dan Pengembangan	1	1	1
6	UNSUR PENGAWASAN UNSUR PEMERINTAHAN			
6.1	Pengawasan	2	2	2
7	UNSUR KEWILAYAHAN			
7.1	Kewilayahan	4	4	4
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8.1	Kesatuan Bangsa dan Politik	5	5	5
IX	URUSAN RUTIN			
1	Program pada setiap Perangkat Daerah	1	1	1
Jumlah		120	111	107

Sumber : Bappeda Kab. Bangka Tahun 2022

Dari total 120 program pada Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023 yang harus dilaksanakan pada tahun 2022, terdapat 9 (sembilan) Program yang tidak dilaksanakan, yaitu : a) 1 (satu) program pada urusan Pendidikan, b) 1 (satu) program pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, c) 1 (satu) program pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, d) 1 (satu) program pada urusan ketenagakerjaan, e) 1 (satu) program pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, f) 3 (tiga) program pada urusan Pangan, g) 1 (satu) program pada urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, h) 1 (satu) program pada urusan pertanian, i) 1 (satu) program pada urusan Perdagangan dan j) 1 (satu) program pada urusan perindustrian. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai hal, antara lain : keterbatasan anggaran, lanjutan kebijakan pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak pandemi Covid-19, serta kebijakan pengendalian inflasi yang memaksa penundaan beberapa program yang dianggap tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut.

2.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja atas sasaran meningkatnya pelaksanaan program pembangunan sesuai perencanaan disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir atas sasaran Meningkatkan Pelaksanaan Program Pembangunan Sesuai Perencanaan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Pelaksanaan Program Tahunan yang sesuai dengan RPJMD	%	87,00	106,09	83,50	113,61	92,50	110,78	89,17	101,33

Persentase jumlah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka pada tahun 2021 relatif meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020. Pada tahun 2020, persentase pelaksanaan program tahunan yang sesuai dengan RPJMD sebesar 83,50 persen atau relatif menurun dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Merebaknya wabah Covid-19 memaksa Pemerintah Daerah untuk melaksanakan berbagai penyesuaian. Rencana Kerja Pemerintah Daerah difokuskan kepada penanganan kasus covid-19. Terdapat beberapa program yang mengalami refocusing atau ditunda pelaksanaannya pada tahun anggaran 2020. Program-program yang bukan prioritas ditunda pelaksanaannya dan dialihkan kepada pelaksanaan program-program yang berdampak langsung pada penanganan Covid-19 baik dibidang kesehatan maupun perlindungan social. Kondisi ini berimplikasi pada menurunnya persentase pelaksanaan program tahunan yang sesuai dengan RPJMD pada tahun tersebut.

Pada tahun 2021, Covid-19 masih menjadi isu yang mempengaruhi pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Rencana

Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya difokuskan lebih kepada recovery atas dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19 berupa belanja kesehatan dalam rangka pelaksanaan vaksin, perlindungan social dan pemulihan ekonomi. Kondisi ini mempengaruhi jumlah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rencana kerja dan anggarannya. Program-program yang mampu meningkatkan belanja Pemerintah untuk masyarakat dilaksanakan dalam rangka pemulihan ekonomi sehingga berdampak kepada meningkatnya persentase pelaksanaan program tahunan yang sesuai dengan RPJMD.

Selanjutnya pada tahun 2022, persentase program yang dilaksanakan relative menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengingat beberapa kebijakan pusat seperti pengurangan transfer ke daerah, lanjutan kebijakan pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak pandemi Covid-19, serta kebijakan pengendalian inflasi sehingga berdampak pada menurunnya jumlah program yang dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2022.

2.3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra Bappeda Tahun 2019-2023

Perbandingan realisasi kinerja dan Capaian Kinerja atas indikator kinerja persentase pelaksanaan program tahunan yang sesuai RPJMD tahun 2022 dengan target jangka menengah Renstra Bappeda Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra Bappeda Tahun 2019-2023 atas sasaran Meningkatnya Pelaksanaan Program Pembangunan Sesuai Perencanaan

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Target Akhir Renstra	Capaian s.d Tahun 2022 Terhadap Target Renstra (%)
1.	Persentase Pelaksanaan Program Tahunan yang sesuai dengan RPJMD	88,00	89,17	101,33	88,00	101,33

Berdasarkan data tersebut diatas, terlihat bahwa capaian kinerja pelaksanaan program tahunan yang sesuai dengan RPJMD pada tahun 2022 telah melampaui dengan target jangka menengah Renstra Bappeda Tahun 2019-2023. Target akhir yang ditetapkan dalam Renstra atas indicator kinerja persentase pelaksanaan program tahunan yang sesuai dengan RPJMD adalah sebesar 88 persen dan sampai dengan tahun 2022 telah direalisasikan sebesar 89,17 persen. Akan tetapi capaian ini bersifat tidak menetap. Kinerja atas indicator ini akan dapat meningkat atau menurun pada tahun-tahun selanjutnya disebabkan berbagai factor seperti disebutkan diatas. Untuk itu perlu kebijakan perencanaan yang kuat agar pelaksanaan program Tahunan sesuai RPJMD dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

2.4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional

Seperti halnya indikator kinerja atas sasaran meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan, indikator kinerja atas sasaran meningkatnya pelaksanaan program pembangunan sesuai perencanaan dengan indikator persentase pelaksanaan program tahunan yang sesuai dengan RPJMD juga tidak memiliki standar nasional.

Walaupun demikian, sepanjang tahun 2022 berbagai penghargaan atas capaian pelaksanaan pembangunan berhasil diraih oleh Pemerintah Kabupaten Bangka. Terdapat 29 penghargaan tingkat nasional yang berhasil diraih oleh Pemerintah Kabupaten Bangka sepanjang tahun 2022 sebagai dampak atas pelaksanaan program-program yang ada dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023. Dalam aspek perencanaan dan capaian pembangunannya, pada tahun 2022 Kabupaten Bangka berhasil meraih penghargaan Top 16 Perencanaan dan Pembangunan Daerah Se-Indonesia dari Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional.

2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan/Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang dilakukan

Keberhasilan ini tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran Perangkat Daerah akan penerapan Sistem Akuntabilitas Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka yang berimplikasi pada peningkatan kinerja. Beberapa langkah yang dilaksanakan oleh Bappeda untuk meningkatkan capaian kinerja atas sasaran meningkatnya pelaksanaan program pembangunan sesuai perencanaan antara lain adalah :

1. Peningkatan koordinasi dalam pengintegrasian program yang dilaksanakan dalam APBD dengan mempedomani RPJMD 2019-2023.
2. Pelaksanaan penetapan perjanjian kinerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program-program RPJMD 2019-2023 yang dilaksanakan secara berkala sepanjang tahun pelaksanaan anggaran.
4. Dukungan Kepala Daerah dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan APBD secara rutin dan berkesinambungan.

Mengingat kondisi realisasi kinerja atas sasaran ini yang masih fluktuatif, beberapa hal yang masih harus diperhatikan Bappeda agar sasaran meningkatnya pelaksanaan program pembangunan sesuai perencanaan tetap tercapai, yaitu :

1. Menginisiasi penguatan komitmen bersama Tim Anggaran untuk mengakomodir pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan RPJMD.
2. Pemanfaatan Rencana Aksi koorsupgah KPK dalam upaya pengintegrasian APBD sesuai dengan perencanaan.
3. Pemanfaatan hasil evaluasi triwulanan atas pelaksanaan program pembangunan dalam penyusunan perencanaan.
4. Mempertahankan pengendalian percepatan pelaksanaan program dan kegiatan secara mingguan yang melibatkan langsung pimpinan daerah.

1.6. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Pelaksanaan strategi dan langkah-langkah antisipatif diatas untuk mewujudkan tercapainya peningkatan pelaksanaan program pembangunan sesuai perencanaan ditunjang oleh pelaksanaan 1 (satu) program, yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah melalui pelaksanaan 1 (satu) kegiatan, yaitu Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan 2 (dua) Sub Kegiatan, yaitu 1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota dan 2) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

1.7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan realisasi capaian kinerja dan realisasi anggaran program yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya pelaksanaan program pembangunan sesuai perencanaan dapat diukur efektifitas pelaksanaan program dalam pencapaian kinerja dimaksud. Dengan realisasi keuangan sebesar 79,21 persen dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 101,33 persen, maka tingkat efektivitas program tersebut dalam mencapai sasaran adalah sebesar 127,93 persen atau sangat efektif (Tabel 3.15).

Tabel 3.15
Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran
Meningkatnya Pelaksanaan Program Pembangunan sesuai Perencanaan
Tahun 2022

Tahun	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran (%)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
2022	79,21	101,33	127,93	Sangat Efektif

Ditinjau dari sisi efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran, dengan capaian kinerja sebesar 101,33 persen dan realisasi keuangan sebesar 79,21

persen, tingkat efisiensi anggaran terhadap pencapaian sasaran meningkatnya pelaksanaan pembangunan sesuai perencanaan mencapai 22,12 persen sebagaimana tertera pada Tabel 3.16 berikut :

Tabel 3.16
Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran
Meningkatnya Pelaksanaan Program Pembangunan Sesuai Perencanaan
Tahun 2022

Tahun	Pagu Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (Rp)	Persentase (%)	Efisiensi (%)
2022	304.469.400,00	241.171.781,00	79,21	22,12

Sumber : Laporan Keuangan Bappeda Tahun 2022

3. Sasaran : Meningkatnya ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan daerah yang akurat.

Perencanaan tidak terlepas dari ketersediaan data-data pendukung perencanaan yang meliputi data-data gambaran umum kondisi daerah. Data-data tersebut mencakup kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan dan informasi terkait indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

3.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Menimbang pentingnya ketersediaan data pendukung perencanaan demi menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, Bappeda Kabupaten Bangka menjadikan meningkatnya ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan daerah yang akurat sebagai salah satu sasaran strategis organisasinya. Sasaran ini diukur dengan indikator persentase ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan daerah yang akurat. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah data pendukung perencanaan yang disediakan oleh Bappeda Kabupaten Bangka pada tahun berjalan terhadap jumlah data yang direncanakan disediakan pada tahun berjalan. Capaian kinerja sasaran tersebut

berikut target dan capaiannya pada tahun 2022 disajikan pada Tabel 3.17 berikut :

Tabel 3.17
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Data Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Akurat Tahun 2022

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	Persentase Ketersediaan Data Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Akurat	%	100,00	100,00	100,00	ST
	Rata-rata Capaian				100,00	ST

Dari tabel diatas diketahui bahwa persentase ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan daerah yang akurat pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100,00 persen dan dapat direalisasikan sebesar 100,00 persen dengan capaian kinerja sebesar 100,00 persen atau termasuk dalam kriteria sangat tinggi. Target kinerja sebesar 100,00 persen merupakan target kinerja yang ditetapkan melalui perubahan perjanjian kinerja sebagai bentuk respon atas perubahan anggaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka pada tahun 2022. Pada perjanjian kinerja induk, target persentase ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan daerah hanya ditargetkan sebesar 75 persen, dibawah target yang ditetapkan dalam Renstra serta dibawah capaian kinerja tahun sebelumnya. Kondisi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan proporsi anggaran yang masih diperkirakan focus untuk penanganan dampak Covid-19. Selanjutnya pada anggaran perubahan dengan kondisi yang relatif memadai, Bappeda menyesuaikan target kinerja atas indicator ini menjadi 100 persen dan dapat direalisasikan sebesar 100 persen juga.

Dalam Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2019-2023, terdapat 6 (enam) data pendukung perencanaan yang direncanakan disediakan oleh Bappeda pada tahun

2022 dan direalisasikan sebanyak 6 Dokumen. Rincian target Renstra, target perjanjian kinerja dan realisasi jenis data yang berhasil disediakan Bappeda Kabupaten Bangka pada tahun 2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.18
Target Renstra, Target Perjanjian Kinerja dan Realisasi
Data Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2022

NO	Jenis Data	Target Renstra	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi
1.	Data Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
2.	Data Sektoral Perencanaan Sosial Budaya	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen (1 Dokumen Pengentasan Kemiskinan Daerah dan 1 Dokumen Evaluasi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)
3.	Data Sektoral Perencanaan Infrastruktur	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen (1 Dokumen Evaluasi Capaian Bidang Perumahan dan 1 Dokumen Analisis Data Rencana Pembangunan Daerah)
JUMLAH		5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka, 2022

3.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, realisasi persentase ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan daerah yang akurat pada tahun 2022 relative lebih baik dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya. Sementara ditinjau dari capaian kinerja, capaian 2 (dua) tahun sebelumnya relative lebih baik jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Ini disebabkan pada tahun 2020 dan 2021 target yang ditetapkan dibawah 100 persen dan capaian kerjanya melebihi target yang

ditetapkan. Sementara pada tahun 2022 target yang ditetapkan merupakan target tertinggi yang bisa ditetapkan, yaitu sebesar 100 persen. (Tabel 3.19).

Tabel 3.19
Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir atas sasaran Meningkatnya Ketersediaan Data Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Akurat Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Persentase ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan daerah yang akurat	%	100	100	62,50	125	83,33	166,67	100	100

3.3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra Bappeda Tahun 2019-2023

Perbandingan realisasi kinerja dan Capaian Kinerja atas indikator kinerja persentase kesesuaian perencanaan tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra Bappeda Tahun 2019-2023 atas sasaran Meningkatnya Ketersediaan Data Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Akurat

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Target Akhir Renstra	Capaian s.d Tahun 2022 Terhadap Target Renstra (%)
1.	Persentase ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan daerah yang akurat	100,00	100,00	100,00	100,00	80,00

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa capaian kinerja indikator persentase ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan daerah yang akurat sampai dengan tahun 2022 telah mencapai 80 persen dari target jangka menengah Renstra Bappeda Tahun 2019-2023. Ini menunjukkan kinerja atas pencapaian target indikator kinerja tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra. Masih terdapat 1 (satu) tahun untuk pencapaian target jangka menengah Renstra Bappeda sehingga didapat capaian kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra.

3.4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional

Tidak terdapat standar nasional atas indikator kinerja persentase ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan daerah yang akurat sehingga tidak dapat dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2022 dengan standar nasional.

3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan/Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang dilakukan

Capaian kinerja Bappeda Kabupaten Bangka atas sasaran meningkatnya ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan daerah yang akurat pada tahun 2022 telah sesuai dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Perubahan Renstra Bappeda 2019-2023 setelah sebelumnya sempat mengalami penurunan realisasi mengingat kebijakan prioritas anggaran Pemerintah Kabupaten Bangka yang masih ditujukan untuk penanganan wabah pandemic Covid-19 pada tahun anggaran 2020 dan 2021. Keberhasilan pencapaian sasaran ini pada tahun 2022 antara lain disebabkan oleh :

1. Dukungan sumber daya baik anggaran maupun sumberdaya manusia yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan pendataan.
2. Komitmen Pimpinan untuk pemenuhan kebutuhan data perencanaan.

Walaupun capaian kinerja telah sesuai dengan target Renstra, akan tetapi berbagai data untuk penyusunan perencanaan masih belum bisa disediakan oleh

Bappeda secara mandiri. Terkait penyediaan data yang tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh Bappeda baik disebabkan oleh dukungan anggaran ataupun terkait kewenangan, beberapa langkah yang dapat dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Bangka antara lain :

1. Melaksanakan proyeksi atas beberapa data capaian pembangunan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan.
2. Bekerja sama dengan instansi teknis penyedia data.
3. Pelaksanaan penyusunan data secara swakola tanpa dukungan anggaran.
4. Pemanfaatan Sistem Aplikasi Data dalam penyediaan data perencanaan.

1.6. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian sasaran ini didukung oleh pelaksanaan 1 (satu) Program, yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah melalui pelaksanaan 1 (satu) kegiatan, yaitu Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu : 1) Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan 2) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD.

1.7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2022, realisasi keuangan atas program-program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran meningkatnya ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan daerah yang akurat sebesar 79,38 persen dan mampu merealisasikan capaian kinerja sasaran sebesar 100,00 persen. Dengan realisasi keuangan dan capaian kinerja tersebut, tingkat efektivitas program dalam mencapai sasaran dimaksud pada tahun 2022 adalah sebesar 125,97 persen atau sangat efektif. Tingkat efektivitas ini selanjutnya disajikan pada Tabel 3.21 berikut.

Tabel 3.21
Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran
Meningkatnya ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan
daerah yang akurat Tahun 2022

Tahun	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran (%)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
2022	79,38	100,00	125,97	Sangat Efektif

Selanjutnya dari sisi efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran, terlihat bahwa tingkat efisiensi anggaran terhadap pencapaian sasaran meningkatya ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan daerah relatif tinggi, mencapai 20,62 persen (Tabel 3.22). Dari pagu anggaran sebesar Rp. 414.747.595,00 terealisasi sebesar Rp. 329.210.788,00 atau sebesar 79,38 persen dan mampu merealisasikan capaian kinerja sebesar 100,00 persen.

Tabel 3.22
Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran
Meningkatnya ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan daerah
yang akurat Tahun 2022

Tahun	Pagu Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (Rp)	Persentase (%)	Efisiensi (%)
2022	414.747.595,00	329.210.788,00	79,38	20,62

Sumber : Laporan Keuangan Bappeda Tahun 2022

4. Sasaran : Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Selain data dan informasi yang akurat dan terkini, hasil kajian juga harus dimanfaatkan dalam penyusunan perencanaan. Hasil pengkajian, penelitian dan pengembangan dapat dijadikan sebagai tindak lanjut pengambilan kebijakan di berbagai bidang. Terkait hal tersebut, sasaran keempat yang tercantum dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bangka adalah meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah

4.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah diukur melalui indikator persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan. Capaian kinerja sasaran berikut target dan capaiannya untuk sasaran tersebut pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.23
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam Perencanaan Pembangunan Tahun 2022

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	%	100,00	100,00	100,00	ST
	Rata-rata Capaian				100,00	ST

Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan diukur melalui indikator kinerja persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dan dirumuskan dengan jumlah hasil penelitian yang dilaksanakan pada tahun berkenaan dibagi dengan jumlah penelitian yang dimanfaatkan pada tahun berkenaan. Pada tahun 2022 persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan ditargetkan sebesar 100 persen dan dapat direalisasikan sebesar 100 persen dengan capaian kinerja sebesar 100 persen atau termasuk dalam kriteria sangat tinggi (Tabel 3.23).

Bappeda menginisiasi pelaksanaan berbagai penelitian yang dapat dipilah ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu menginisiasi penyusunan penelitian yang dituangkan dalam jurnal penelitian, penelitian terkait penyusunan naskah akademis serta pengembangan dan peningkatan inovasi daerah. Sepanjang tahun 2022 terdapat 5 (lima) penelitian yang dituangkan dalam jurnal penelitian daerah

serta 1 (satu) penelitian terkait penyusunan naskah akademis dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.24
Daftar Penelitian dan Naskah Akademis yang disusun Bappeda Tahun 2022

NO	JUDUL PENELITIAN/NASKAH AKADEMIS
1.	Pendekatan Kewilayahan dalam Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kabupaten Bangka
2.	Inovasi Reklamasi Laut untuk Pemulihan Ekosistem Lautan dan Penanganan Perubahan Iklim
3.	Industri Pangan Berkelanjutan Berbasis Sagu Rumbia: Inovasi Berbasis Halal, Digital dan Integral
4.	Inovasi SMART-IN PIRT Bersertifikat Halal (Revolusi Pelayanan Pangan Industri Rumah Tangga Berbasis Internet Of Things (IOT)
5.	Pendekatan Kewilayahan dalam Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kabupaten Bangka
6.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tentang Bangunan Gedung

Selain itu Bappeda sebagai lembaga yang memiliki peran koordinasi menginisiasi penyusunan berbagai inovasi yang ditujukan untuk peningkatan pelayanan public yang pada akhirnya akan meningkatkan capaian pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sepanjang tahun 2022, Bappeda menginisiasi penyusunan ratusan inovasi pelayanan public. Sebagian diantaranya kemudian diikutsertakan dalam kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional (Tabel 3.25).

Tabel 3.25
Daftar Inovasi yang diikutsertakan
Dalam Kompetisi Tingkat Nasional Tahun 2022

No.	Judul Inovasi	Kategori Inovasi	Perangkat Daerah
1	Si Luki Dan Si Eko Teman Baik (Reklamasilaut Untuk Pemulihan Ekosistem Lautan Dan Penanganan Perubahan Iklim)	Pelayanan Publik	Bappeda
2	ABANG TIMAH UNTUK BU DISA (Lahan Bekas Tambang Timah Untuk Budidaya Padi Sawah)	Pelayanan Publik	Dinas Pangan dan Pertanian
3	Pundok Digital Informatika Setara	Pelayanan Publik	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika
4	Kolak Besti 2023 (Kolaborasi Untuk Bangka Bebas Stunting 2023)	Pelayanan Publik	Bappeda
5	Pak Kastama Untuk Bu Irta	Pelayanan Publik	Dinas Perikanan
6	Eccovilage Strategi Ketahanan Pangan Keluarga Di Masa Dan Pasca Pandemi	Pelayanan Publik	Kecamatan Sungailiat
7	Ransel Si Dora	Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan
8	Dibuka Tabungan Untuk Menikah (Subsidi Bunga Kredit Usaha Perorangan Tanpa Syarat Berat Dengan Cicilan Ringan Untuk Usaha Mikro Se Kabupaten Bangka Agar Omset Meningkatkan Dan Bertambah)	Pelayanan Publik	DINPM2KUKM
9	Nyaman Stop "BABS" Dibalik Kocokan Arisan Ibu	Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan
10	Rumpis (Rumah Pusat Informasi Serviks)	Pelayanan Publik	Kecamatan Sungailiat
11	Intan Anggun (Pinjaman Tanpa Bunga Tanpa Agunan)	Pelayanan Publik	Bappeda
12	Inovasi Gerbang Mulya (Gerakan Bangka Meningkatkan Upaya Pelayanan Sosial Bersama)	Pelayanan Publik	Dinas Sosial
13	"Herbal Balls" Terapi Komplementer Untuk Membantu Dalam Mengatasi Nyeri Dan Merangsang Kontraksi Miometrium	Pelayanan Publik	RSUD Depati Bahrin
14	Ipb Bogor (Industri Pangan Berkelanjutan Berbasis Sagu Rumbia: Inovasi Berbasis Halal, Digital Dan Integral)	Pelayanan Publik	Bappeda
15	Dulang Yamani PRIDE Disabilitas (Dulang Yamanipeduli, Responsif, Digital, Efektif Terhadap Disabilitas)	Pelayanan Publik	RSUD Depati Bahrin
16	Si Intan Hutan Kota Sungailiat	Pelayanan Publik	Dinas Lingkungan Hidup
17	Layanan Emergency Tanggap Sigap Dan Gratis Secara Online (LETS GO)	Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka, 2022

Dari beberapa inovasi yang diikutsertakan dalam kompetisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangka mampu bersaing ditingkat Nasional dan Propinsi dengan memperoleh predikat terbaik pada ajang tersebut. Inovasi Pelayanan Publik Intan Anggun yang diinisiasi oleh Bappeda berhasil meraih penghargaan TOP 99 dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sementara beberapa inovasi yang diusung perangkat daerah lainnya juga mendapat penghargaan pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.26 berikut :

Tabel 3.26
Daftar Inovasi Memperoleh Penghargaan Pada Tahun 2022

NO	DAFTAR INOVASI	PENGHARGAAN
1.	Inovasi Pelayanan Publik Intan Anggun (Pinjaman Tanpa Bunga Tanpa Agunan) Bappeda	Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
2.	Inovasi “Sapi Kurban (Subsidi Usaha Perorangan/ Mikro Melalui Kredit Usaha)”	Penghargaan Top 5 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kipp) Tingkat Provinsi Kep. Bangka Belitung
3.	Inovasi Pak Kastama Untuk Bu Irta (Pemanfaatan Kolong Bekas Tambang Timah Untuk Budidaya Ikan Air Tawar) Dinas Perikanan Kab Bangka	Penghargaan Top 10 Kompetisi Pelayanan Publik Tingkat Prov Tahun 2021

4.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Capaian kinerja Bappeda Kabupaten Bangka atas indikator sasaran persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan pada tahun 2022 (Tabel 3.27), mampu menyamai capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, yang menunjukkan konsistensi kinerja Bappeda dalam urusan penelitian dan

pengembangan. Urusan penelitian yang dilaksanakan oleh Bappeda difokuskan pada penyusunan kajian dan inovasi daerah telah sesuai dengan target tahunan yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda.

Tabel 3.27
Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir atas sasaran Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam Perencanaan Pembangunan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100

4.3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra Bappeda Tahun 2019-2023

Perbandingan realisasi kinerja dan Capaian Kinerja atas indikator kinerja persentase penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan tahun 2022 dengan target jangka menengah Renstra Bappeda Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.28
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra Bappeda Tahun 2019-2023 atas sasaran Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam Perencanaan Pembangunan

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%	Target Akhir Renstra	Capaian s.d Tahun 2022 Terhadap Target Renstra (%)
1.	Persentase Hasil Penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	100,00	100,00	100,00	100,00	80,00

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa capaian kinerja indikator persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sampai dengan tahun 2022 telah mencapai 80 persen dari target jangka menengah Renstra Bappeda Tahun 2019-2023. Ini menunjukkan kinerja atas pencapaian target indicator kinerja tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra. Masih terdapat 1 (satu) tahun untuk pencapaian target jangka menengah Renstra Bappeda sehingga didapat capaian kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra.

4.4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional

Tidak terdapat standar nasional atas indikator kinerja persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan. Keberhasilan capaian indikator kinerja ini secara nasional dapat dibuktikan melalui capaian penghargaan ditingkat nasional atas kerja keras Bappeda dalam menginisiasi penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan dan diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Keberhasilan tersebut antara lain diperolehnya **penghargaan TOP 99 atas Inovasi Pelayanan Publik Intan Anggun dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional** yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Disamping itu dengan ratusan inovasi yang berhasil diinisiasi oleh Bappeda, Tahun 2022 Kementerian Dalam Negeri memberi **penghargaan Innovation Government Award (IGA) sebagai Kabupaten Terinovatif**.

4.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan/Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang dilakukan

Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan didukung oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Komitmen Kepala Daerah dalam peningkatan dan pengembangan inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan public melalui Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Kabupaten Bangka dan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Replikasi Inovasi Pelayanan Publik di Kabupaten Bangka.
2. Pelaksanaan Laboratorium Inovasi serta pembentukan Sekolah Inovasi oleh Bappeda dalam rangka menginternalisasi dan meningkatkan pengembangan inovasi daerah.

Selanjutnya beberapa rencana tindaklanjut yang dapat dilaksanakan oleh Bappeda untuk pencapaian sasaran meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan dimasa mendatang, antara lain :

1. Meningkatkan internalisasi penelitian dan pengembangan sampai ke seluruh bidang pada perangkat daerah melalui pelaksanaan Laboratorium Inovasi dan Sekolah inovasi.
2. Mendorong pemberian reward bagi perangkat daerah atau aparatur yang mampu melaksanakan inovasi penyelenggaraan pelayanan publik dengan baik.

4.6. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian sasaran meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan didukung oleh pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah melalui pelaksanaan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan serta pelaksanaan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu : Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan.

4.7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Realisasi keuangan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran diatas pada tahun 2022 sebesar 63,64 persen dan mampu merealisasikan capaian kinerja sasaran sebesar 100 persen atau dengan kata lain tingkat efektivitas program dalam mencapai sasaran dimaksud pada tahun 2022 adalah sebesar 157,13 persen atau sangat efektif. Secara rinci, tingkat efektivitas program dalam mencapai sasaran meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah disajikan pada Tabel 3.29 berikut :

Tabel 3.29
Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran
Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam
perencanaan pembangunan daerah.
Tahun 2022

Tahun	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran (%)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
2022	63,64	100,00	157,13	Sangat Efektif

Sementara ditinjau sisi efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran, terlihat bahwa tingkat efisiensi anggaran terhadap pencapaian sasaran meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah mencapai 36,36 persen. Efisiensi ini diperoleh dengan mengurangi realisasi capaian kinerja (100,00 persen) terhadap realisasi anggaran program (63,64 persen) sebagaimana tertera pada Tabel 3.30 berikut :

Tabel 3.30
Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran
Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam
perencanaan pembangunan daerah.
Tahun 2022

Tahun	Pagu Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (Rp)	Persentase (%)	Efisiensi (%)
2022	455.135.600,00	289.665.488,00	63,64	36,36

Sumber : Laporan Keuangan Bappeda Tahun 2022

5. Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda.

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Sebagai bentuk perwujudan tanggung jawab dimaksud, Bappeda Kabupaten Bangka menjadikan meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda sebagai salah satu sasaran yang ingin dicapai. Sasaran ini diukur melalui indikator nilai evaluasi AKIP Bappeda.

5.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Target nilai evaluasi AKIP Bappeda tahun 2022 masih seperti tahun sebelumnya yang ditargetkan mendapatkan opini A. Indikator ini merupakan indikator sasaran yang belum dapat diukur capaian kinerjanya pada saat laporan ini disusun. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2022 oleh Inspektorat Kabupaten Bangka sesuai peraturan baru akan dilaksanakan pada bulan Maret 2022. Sehingga pada saat pelaporan ini disusun, nilai evaluasi AKIP Bappeda belum dapat diperoleh.

Tabel 3.31
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja Bappeda Tahun 2022

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	Nilai Evaluasi AKIP Bappeda	Kategori	A	...*)*)	N/A
	Rata-rata Capaian					N/A

5.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan realisasi kinerja dan Capaian Kinerja atas indikator kinerja persentase keselarsan perencanaan tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.32
Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan Tahun Lalu
dan Beberapa Tahun Terakhir atas sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Evaluasi AKIP Bappeda	%	A	100%	A	100%	A	100%

Sementara bila melihat capaian kinerja atas indikator nilai evaluasi AKIP Bappeda tahun-tahun sebelumnya, terlihat bahwa nilai AKIP Bappeda telah berada pada jalur yang tepat. Bappeda mampu mempertahankan nilai evaluasi AKIP pada kategori A mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 (Tabel 3.32). Ini menunjukkan bahwa Bappeda Kabupaten Bangka memiliki kinerja yang tinggi dan sangat akuntabel. Aspek-aspek dalam akuntabilitas Bappeda, yang dimulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja serta pencapaian kinerja Bappeda telah sangat memuaskan. Diharapkan pada akhir periode Renstra Tahun 2019-2023, Bappeda mampu meraih predikat AA atas nilai akuntabilitasnya sesuai dengan target akhir Renstra.

Perkembangan nilai AKIP Bappeda yang telah konsisten pada kategori A, juga diikuti oleh perkembangan nilai evaluasi AKIP itu sendiri. Berdasarkan hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat, nilai AKIP Bappeda pada tahun 2019 berada pada nilai 83,15. Nilai tersebut terus tumbuh menjadi 84,78 pada tahun 2020 dan kembali tumbuh menjadi 87,62 pada tahun 2021 (Tabel 3.33).

Tabel 3.33
Perkembangan Nilai AKIP Bappeda Tahun 2019-2021

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Nilai Evaluasi AKIP Bappeda	Nilai	83,15	84,78	87,62

5.3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra Bappeda Tahun 2019-2023

Perbandingan realisasi kinerja dan Capaian Kinerja atas indikator kinerja hasil evaluasi AKIP Bappeda tahun 2022 dengan target jangka menengah Renstra Bappeda Tahun 2019-2023 belum dapat dibandingkan mengingat hasil evaluasi AKIP Bappeda Tahun 2022 belum keluar.

Tabel 3.34
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra Bappeda Tahun 2019-2023 atas sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%	Target Akhir Renstra	Capaian s.d Tahun 2022 Terhadap Target Renstra (%)
1.	Nilai Evaluasi AKIP Bappeda	A	A	A	A	80,00

Tabel 3.34 diatas menunjukkan perbandingan realisasi kinerja nilai evaluasi AKIP Bappeda tahun 2021 dengan target akhir Renstra Bappeda Tahun 2019-2023. Pada tahun 2021, nilai evaluasi AKIP Bappeda berada kategori A. Nilai ini telah sesuai dengan target akhir Renstra Bappeda Tahun 2019-2023. Akan tetapi kondisi tersebut akan bisa berubah ke arah yang lebih baik atau lebih buruk sesuai dengan kemampuan Bappeda dalam mempertahankan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kerjanya.

5.4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional

Seperti halnya perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah Renstra Bappeda Tahun 2019-2022, perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional juga belum dapat dibandingkan mengingat hasil evaluasi AKIP Bappeda Tahun 2022 belum keluar. Data realisasi kinerja yang dapat dibandingkan masih berupa data realisasi kinerja tahun 2020 dan 2021. Perbandingan dilakukan dengan membandingkan nilai komponen evaluasi AKIP dengan standar bobot penilaian. Perbandingan nilai evaluasi AKIP Bappeda per komponen dengan standar bobot penilaian untuk tahun 2020 dan 2021 disajikan pada Tabel 3.35 berikut :

Tabel 3.35
Perbandingan Penilaian Evaluasi AKIP Bappeda per Komponen dengan Standar Bobot Penilaian Tahun 2020-2021

No	KOMPONEN PENILAIAN AKIP	BOBOT PENILAIAN	TAHUN	
			2020	2021
1.	Perencanaan Kinerja	30	28,07	28,80
2.	Pengukuran Kinerja	25	20,94	21,25
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,49	12,49
4.	Evaluasi Internal	10	8,00	8,00
5.	Capaian Kinerja	20	15,28	17,08
Nilai Evaluasi		100	84,78	87,62
Tingkat Akuntabilitas			A	A

Sumber : LHE AKIP Bappeda Tahun 2020 dan 2021

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa sampai tahun 2021 nilai komponen perencanaan kinerja Bappeda mencapai 28,80 dari total bobot 30 (96%), nilai pengukuran kinerja sebesar 21,25 dari total bobot 25 (85%), pelaporan kinerja sebesar 12,49 dari total bobot 15 (83,27%), evaluasi internal sebesar 8 dari total bobot 10 (80%) dan capaian kinerja 17,08 dari total bobot 20 (85,40%). Per komponen penilaian, aspek perencanaan kinerja Bappeda merupakan komponen penilain dengan capaian tertinggi yaitu 96% dan evaluasi internal merupakan komponen dengan capaian terendah yaitu 80% dari total bobot. Perbandingan penilaian per komponen ini selanjutnya dapat menjadi bahan untuk peningkatan nilai evaluasi AKIP Bappeda dimasa-masa mendatang.

5.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan/Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang dilakukan

Secara umum kemampuan Bappeda mempertahankan nilai akuntabilitas pada kriteria A, tidak terlepas dari berbagai langkah yang dilaksanakan oleh Bappeda dalam upaya peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan peningkatan capaian kinerja.

5.6. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda didukung oleh pelaksanaan 1 (satu) program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota) dan pelaksanaan beberapa Kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

5.7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Realisasi keuangan program-program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda pada tahun 2022 adalah sebesar 77,35 persen. Tingkat efektivitas dan efisiensi program dalam mencapai sasaran ini belum dapat diukur mengingat capaian kinerja atas sasaran ini belum dapat diukur.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2022 diuraikan berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung kinerja sasaran. Adapun gambaran persentase realisasi anggaran pelaksanaan program yang mendukung kinerja sasaran tahun 2022 pada Bappeda Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan

Untuk menunjang kinerja sasaran pertama yaitu keselarasan perencanaan pembangunan daerah terdapat 1 (satu) program yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Bangka. Besaran alokasi anggaran serta realisasi anggaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.36
Besaran dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Penunjang Sasaran Meningkatnya Keselarasan
Antar Dokumen Perencanaan Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	415.724.750,00	298.369.508,00	71,77
1.1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	415.724.750,00	298.369.508,00	71,77
1.1.1	<i>Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya</i>	<i>128.715.000,00</i>	<i>117.593.610,00</i>	<i>91,36</i>
1.1.2	<i>Sub Kegiatan Konsultasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD</i>	<i>34.223.400,00</i>	<i>19.237.250,00</i>	<i>56,21</i>
1.1.3	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota</i>	<i>116.203.400,00</i>	<i>86.799.500,00</i>	<i>74,70</i>
1.1.4	<i>Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>136.582.950,00</i>	<i>74.739.148,00</i>	<i>54,72</i>
	JUMLAH	415.724.750,00	298.369.508,00	71,77

Sumber : Laporan Keuangan Bappeda Tahun 2022

2. Meningkatnya Pelaksanaan Program Pembangunan Sesuai Perencanaan

Besaran alokasi anggaran beserta realisasi anggaran yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Bangka untuk menunjang kinerja sasaran meningkatnya pelaksanaan program pembangunan sesuai perencanaan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.37
Besaran dan Realisasi Anggaran
Penunjang Sasaran Meningkatnya Pelaksanaan
Program Pembangunan Sesuai Perencanaan Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	304.469.400,00	241.171.781,00	79,21
1.1	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	304.469.400,00	241.171.781,00	79,21
1.1.1	<i>Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota</i>	<i>245.462.600,00</i>	<i>188.851.612,00</i>	<i>76,94</i>
1.1.2	<i>Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>59.006.800,00</i>	<i>52.320.169,00</i>	<i>88,67</i>
	JUMLAH	304.469.400,00	241.171.781,00	79,21

Sumber : Laporan Keuangan Bappeda Tahun 2022

3. Meningkatnya Ketersediaan Data Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Akurat

Sementara untuk sasaran meningkatnya ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan daerah yang akurat, besaran alokasi anggaran serta realisasi anggaran yang menunjang pencapaian sasaran tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.38
Besaran dan Realisasi Anggaran
Penunjang Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Data Pendukung Perencanaan
Pembangunan Daerah Yang Akurat Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	414.747.595,00	329.210.788,00	79,38
1.1	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	414.747.595,00	329.210.788,00	79,38
1.1.1	<i>Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>281.745.860,00</i>	<i>220.454.032,00</i>	<i>78,25</i>
1.1.2	<i>Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD</i>	<i>133.001.735,00</i>	<i>108.756.756,00</i>	<i>81.77</i>
	JUMLAH	414.747.595,00	329.210.788,00	79,38

Sumber : Laporan Keuangan Bappeda Tahun 2022

4. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam Perencanaan Pembangunan

Besaran alokasi anggaran dan realisasi anggaran yang menunjang pencapaian kinerja sasaran meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.39
Besaran dan Realisasi Anggaran Penunjang
Sasaran Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan
Dalam Perencanaan Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	455.135.600,00	289.665.488,00	63,64
1.1	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	455.135.600,00	289.665.488,00	63,64
1.1.1	<i>Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan</i>	<i>455.135.600,00</i>	<i>289.665.488,00</i>	<i>63,64</i>
	JUMLAH	455.135.600,00	289.665.488,00	63,64

Sumber : Laporan Keuangan Bappeda Tahun 2022

5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda

Besaran alokasi anggaran dan realisasi anggaran yang menunjang pencapaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda adalah sebagai berikut :

Tabel 3.40
Besaran dan Realisasi Anggaran
Penunjang Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda
Tahun 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.927.774.110,00	6.132.422.175,00	77,35
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.584.400,00	8.170.550,00	56,02
1.1.1	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>6.776.400,00</i>	<i>4.111.750,00</i>	<i>60,68</i>
1.1.2	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>7.808.000,00</i>	<i>4.058.800,00</i>	<i>51,98</i>

1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.927.840.792,00	4.330.797.540,00	73,06
1.2.1	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	5.927.840.792,00	4.330.797.540,00	73,06
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian	94.200.000,00	83.049.000,00	88,54
1.3.1	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	94.200.000,00	83.049.000,00	88,54
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	505.148.178,00	490.131.348,00	97,03
1.4.1	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	505.148.178,00	490.131.348,00	97,03
1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300.723.400,00	258.996.500,00	86,12
1.5.1	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	300.723.400,00	258.996.500,00	86,12
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	686.622.340,00	596.070.053,00	86,81
1.6.1	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	531.544.400,00	464.969.080,00	87,48
1.6.2	<i>Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	112.071.000,00	88.938.433,00	79,36
1.6.3	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	43.006.940,00	42.162.540,00	98,04
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	398.655.000,00	364.847.184,00	91,52
1.7.1	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	171.985.000,00	160.117.084,00	93,10
1.7.2	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	190.730.000,00	189.395.000,00	99,30
1.7.3	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	35.940.000,00	15.335.100,00	42,67
	JUMLAH	7.927.774.110,00	6.132.422.175,00	77,35

Sumber : Laporan Keuangan Bappeda Tahun 2022

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 menyajikan keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Bappeda Kabupaten Bangka yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Secara umum capaian kinerja Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2022 sangat memuaskan. Dari 5 (lima) sasaran strategis yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022, sebanyak 1 (satu) sasaran memiliki capaian kinerja diatas 100 persen, 3 (tiga) sasaran dengan capaian kinerja 100 persen, dan 1 (satu) sasaran yang belum dapat diukur capaiannya.

Capaian kinerja masing-masing indikator sasaran adalah : 1) persentase keselarasan antar dokumen perencanaan ditargetkan sebesar 100 persen, realisasi sebesar 100 persen dengan capaian kinerja sebesar 100,00 persen, 2) persentase pelaksanaan program tahunan yang sesuai dengan RPJMD ditargetkan sebesar 88,00 persen, realisasi 89,17 persen dan capaian kinerja sebesar 101,33 persen, 3) persentase ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan daerah yang akurat dengan target 100,00 persen, realisasi 100,00 persen dan capaian kinerja sebesar 100,00 persen dan 4) persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan target 100 persen, realisasi 100,00 persen dan capaian kinerja sebesar 100,00 persen. Capaian kinerja indikator nilai evaluasi AKIP belum dapat diukur mengingat evaluasi atas kinerja tahun 2022 baru dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2023.

Pencapaian sasaran dilakukan melalui beberapa upaya antara lain penguatan akuntabilitas lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka melalui peningkatan kapasitas dan komitmen kepala OPD, penerbitan Peraturan Bupati Bangka tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangka, pemanfaatan aplikasi pendukung, menginisiasi pengintegrasian APBD berpedoman kepada RPJMD, penetapan perjanjian kinerja sampai dengan pelaksana sebagai bentuk komitmen

pelaksanaan program pembangunan sesuai sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program-program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bangka dan berbagai upaya koordinasi dengan stakeholder yang terkait, peningkatan penyediaan data perencanaan serta pelaksanaan penelitian dalam rangka mendukung perencanaan.

Demikian Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2022 ini disusun sebagai sarana pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai bahan evaluasi atas pencapaian kinerja yang diperjanjikan guna perbaikan kinerja di masa mendatang.



LAMPIRAN



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ir. PAN BUDI MARWOTO, M.Si
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MULKAN, SH., MH
Jabatan : BUPATI BANGKA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 21 Januari 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



MULKAN, SH., MH



Ir. PAN BUDI MARWOTO, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661214 199203 1 004

PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan	Persentase Keselarasan Antar Perencanaan	%	100.00
2	Meningkatnya Pelaksanaan Program Pembangunan Sesuai Perencanaan	Persentase pelaksanaan program tahunan yang sesuai RPJMD	%	88.00
3	Meningkatnya Ketersediaan Data Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Akurat	Persentase Ketersediaan Data Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Akurat	%	75.00
4	Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan Dalam Perencanaan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan Dalam Perencanaan	%	100.00
5	Meningkatnya Akuntabilitas Bappeda	Nilai Evaluasi AKIP Bappeda	Kategori/Nilai	A (85,00)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	432.603.350,00	APBD
2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	356.352.000,00	APBD
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.343.052.850,00	APBD
TOTAL		8.132.008.200,00	

Sungailiat, 21 Januari 2022
 PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

MULKAN, SH., MH



Ir. PAN BUDI MARWOTO, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19661214 199203 1 004



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKA**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ir. PAN BUDI MARWOTO, M.Si
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MULKAN, SH., MH
Jabatan : BUPATI BANGKA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PIHAK KEDUA
MULKAN, SH., MH

Sungailiat, Oktober 2022
PIHAK PERTAMA

Ir. PAN BUDI MARWOTO, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661214 199203 1 004

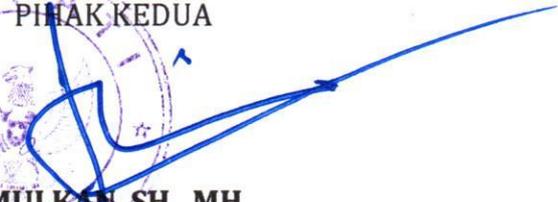
PERJANIAN KINERJA PERUBAHAN

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN : 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan	Persentase Keselarasan Antar Perencanaan	%	100.00
2	Meningkatnya Pelaksanaan Program Pembangunan Sesuai Perencanaan	Persentase pelaksanaan program tahunan yang sesuai RPJMD	%	88.00
3	Meningkatnya Ketersediaan Data Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Akurat	Persentase Ketersediaan Data Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Akurat	%	100.00
4	Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan Dalam Perencanaan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan Dalam Perencanaan	%	100.00
5	Meningkatnya Akuntabilitas Bappeda	Nilai Evaluasi AKIP Bappeda	%	A

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.134.941.745,00	APBD
2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	455.135.600,00	APBD
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.927.774.110,00	APBD
TOTAL		9.517.851.455,00	

PIHAK KEDUA



MULKAN, SH., MH

Sungailiat, Oktober 2022

PIHAK PERTAMA



Ir. PAN BUDI MARWOTO, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661214 199203 1 004

Nomor : B/251/AA.05/2022
Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2021

7 Maret 2022

Yth. Bupati Bangka

di
Sungailiat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kabupaten Bangka. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk **menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*)** serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kabupaten Bangka memperoleh nilai **72,27** atau predikat **BB**. **Penilaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sudah cukup memadai jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya.** Hal ini disebabkan pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Bangka sudah berjalan dengan sangat baik namun sangat perlu dilakukan beberapa perbaikan lebih lanjut. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2020	2021
a.	Perencanaan Kinerja	30	23,57	23,75
b.	Pengukuran Kinerja	25	18,00	18,15
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,30	10,40
d.	Evaluasi Internal	10	6,37	6,53
e.	Capaian Kinerja	20	13,26	13,44
	Nilai Hasil Evaluasi	100	71,60	72,27
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Pemerintah Kabupaten Bangka telah menerapkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik, meskipun terjadi perbaikan kualitas jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sejumlah rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (LHE) Tahun 2020, belum seluruhnya dapat diselesaikan sampai saat ini.

Beberapa catatan terkait dengan kualitas implementasi AKIP di Pemerintah Kabupaten Bangka adalah:

1. Dalam rangka menyelaraskan perencanaan kinerja daerah ke perencanaan kinerja urusan di setiap Perangkat Daerah, Pemkab Bangka telah menyusun *cascading* kinerja mulai dari level sasaran strategis daerah ke sasaran strategis perangkat daerah sampai dengan sasaran masing-masing sub kegiatan, namun *cascading* tersebut belum sepenuhnya tepat menggambarkan strategi atau faktor-faktor penting yang pencapaiannya berpengaruh secara langsung terhadap capaian sasaran strategis daerah atau perangkat daerah, sehingga penetapan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang telah dipilih belum sepenuhnya efektif dalam pencapaian kinerja;
2. Dalam *cascading* kinerja Perangkat Daerah terdapat indikator kinerja utama Perangkat Daerah, indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum ada penjelasan formulasi penghitungan dan keterangan yang dibutuhkan, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi dan kesulitan dalam pengukuran indikator-indikator kinerja tersebut;
3. Dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja, perlu adanya keselarasan kinerja pegawai dengan kinerja organisasi (Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah). Pemkab Bangka telah menyusun ukuran kinerja pegawai (SKP) untuk setiap pegawai, namun belum sepenuhnya SKP/kinerja pegawai selaras dengan kinerja organisasi;
4. Pemkab Bangka telah menyusun Laporan Kinerja untuk Pemerintah Daerah dan tiap-tiap Perangkat Daerah secara tepat waktu, namun pemanfaatan laporan kinerja belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut terjadi karena belum berjalannya budaya Dialog Kinerja secara optimal antara Pimpinan dan seluruh pegawai untuk membahas analisis capaian kinerja yang dimuat dalam Laporan Kinerja yang perlu diperhatikan agar dapat mencapai target kinerja pada tahun berjalan;
5. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Pemkab Bangka telah mengevaluasi akuntabilitas kinerja internal dan memberikan rekomendasi perbaikan penerapan SAKIP kepada seluruh Perangkat Daerah, namun belum sepenuhnya optimal mendorong perbaikan implementasi SAKIP di setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan budaya kinerja, kami kembali merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam menyusun *cascading* kinerja, disarankan dengan menyusun pohon kinerja sebagai alat bantu dalam proses penyelarasan perencanaan untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan dalam menghasilkan *outcome* yang diinginkan. Dengan pohon kinerja kita dapat mengidentifikasi kondisi-kondisi yang perlu diwujudkan untuk mencapai *outcome*, termasuk strategi-strategi dan aktivitas-aktivitas yang tepat dan perlu dilaksanakan. Hal tersebut juga dapat membantu Pemerintah Daerah dalam memilih dan menetapkan Program,

Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang tepat sesuai Kepmendagri Nomor 50-5889 Tahun 2021;

2. Kepala Perangkat daerah agar melengkapi penjelasan indikator kinerja utama Perangkat Daerah dengan penjelasan yang memadai dan formulasi penghitungan yang tepat untuk tiap-tiap IKU Perangkat Daerah sampai ke indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pengukuran dan pengumpulan data kinerja Perangkat Daerah;
3. Menyelaraskan kinerja individu pegawai dengan kinerja organisasi dengan berpedoman pada PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Melaksanakan budaya "Dialog Kinerja" secara optimal diantaranya dengan membahas analisis dan capaian kinerja dalam laporan kinerja tahun sebelumnya sehingga dapat mengidentifikasi potensi permasalahan pada tahun berjalan agar target kinerja tahun berjalan dapat tercapai sesuai rencana;
5. APIP agar melaksanakan evaluasi internal dengan lebih optimal, diantaranya melalui peningkatan pemahaman evaluator internal, mampu menangkap permasalahan utama penerapan SAKIP di setiap Perangkat Daerah, dan memberikan rekomendasi yang tepat yang dapat ditindaklanjuti Perangkat Daerah, serta mengkomunikasikan temuan hasil evaluasi dengan baik dan memantau tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan SAKIP secara berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.



Deputi Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan,

Erwan Agus Purwanto
Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.



panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

PIAGAM PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA:

**Pemerintah Kab. Bangka
Bappeda Kabupaten Bangka**

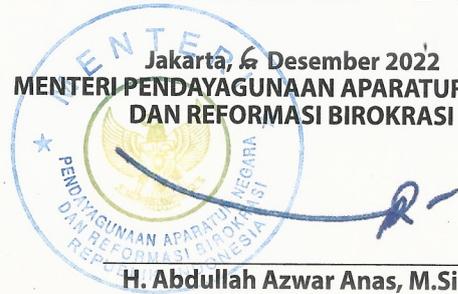
Atas Inovasi

INTAN ANGGUN
(Pinjaman Tanpa Bunga Tanpa Agunan)

Sebagai:

TOP 99 INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2022

Jakarta, 6 Desember 2022
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



H. Abdullah Azwar Anas, M.Si





Program Penghargaan

INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) 2022

kepada

KABUPATEN BANGKA

sebagai

KABUPATEN SANGAT INOVATIF

JAKARTA, DESEMBER 2022

MENTERI DALAM NEGERI

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN